

**KONSEP PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) 20/2006 DAN PP38/2007:
SEBUAH GAGASAN AWAL DARI UNIVERSITAS¹**

Sigit Supadmo Arif²

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan untuk memberikan suatu masukan kepada pemerintah sebagai menyusun kebijakan pemberdayaan organisasi petani pemakai air sehubungan dengan terbitnya beberapa kebijakan pengelolaan tentang irigasi. Sebagai dasar penyusunan gagasan adalah dipakainya konsep tentang hampiran human capital dan manajemen pengetahuan acuan pemberdayaan. Untuk mendukung gagasan maka disajikan suatu data aktual di lapangan yang berasal dari lomba P3A tingkat nasional tahun 2007.

Kata kunci : *pemberdayaan, P3A, human capital, dan manajemen pengetahuan*

¹ Disampaikan dalam Gelar Teknologi dan Seminar Nasional Teknik Pertanian 2008 di Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Yogyakarta 18-19 November 2008

² Dosen Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

A. PENGANTAR

Mengikuti proses reformasi sosial politik yang telah terjadi hampir sepuluh tahun lalu, maka telah diterbitkan beberapa kebijakan baru di negeri ini, termasuk kebijakan pengelolaan sumberdaya air khususnya irigasi. Beberapa undang-undang (UU) telah diterbitkan di antaranya adalah UU no 7/2004 tentang sumberdaya air, UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU no 22/1999, UU no 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pengganti UU 23/1999.

UU no 7/2004 ini kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan pemerintah (PP) no 20/2006 tentang irigasi sebagai aturan pelaksanaannya. Demikian pula UU no 32/2004 juga ditindak lanjuti pemerintah dengan mengeluarkan PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan terbitnya PP 38/2007 ini maka kewenangan, hak dan kewajiban dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pengelolaan irigasi di masing-masing aras pemerintahan menjadi semakin jelas.

Seperti diketahui bahwa peran sumberdaya manusia dan institusi dalam pengelolaan sumberdaya air termasuk irigasi sangatlah penting. Untuk itu urusan pemberdayaan bagi kedua unsur dalam sistem pengelolaan irigasi tersebut menjadi sangatlah berarti dan bermakna bagi keberhasilan pengelolaan irigasi.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) no 12 tahun 1992 tentang pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) , maka pelaksanaan pemberdayaan dan fasilitasi organisasi P3A dilakukan oleh tiga departemen, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri, yang masing-masing membawahi bidang teknologi irigasi, pertanian, dan institusi pengelola irigasi. Namun secara faktual Departemen Pekerjaan Umum lebih banyak berperan dalam pelaksanaannya. Bahkan sesuai dengan PP 20/2006, maka aturan pelaksanaan tentang pedoman pemberdayaan organisasi petani pemakai air di berbagai aras pengelolaan suatu Daerah irigasi (DI) dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam bentuk Peraturan Menteri (PERMEN) PU bernomor 33 /PRT/M/2007.

Dengan dikeluarkannya PP 38/2007 maka pelaksanaan pemberdayaan P3A menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian dan Dinas teknis yang membawahi bidang pertanian di daerah. Makalah ini bertujuan untuk mengulas pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang telah dilakukan pemerintah dan memberikan suatu gagasan

tentang konsep pemberdayaan P3A pasca terbitnya PP 20/2006 dan PP no 38/2007 tersebut. Ulasan pelaksanaan pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan lomba tingkat Nasional tahun 2007.

B. PANGKAL PIKIR

Pasal 66 ayat (1) PP 20/2006 tentang irigasi menetapkan bahwa aset pengelolaan irigasi terdiri atas Jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi. Dan dalam penjelasan PP tersebut disebutkan bahwa yang termasuk pendukung pengelolaan irigasi adalah kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) yang termasuk kelembagaan irigasi, adalah perkumpulan petani pemakai air, instansi pemerintah yang membidangi irigasi dan komisi irigasi. Setelah itu disebutkan pula bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Dan berdasarkan PP 20 Pasal 28 PP 20//2006 disebutkan bahwa Menteri yang membidangi irigasi mengeluarkan aturan pelaksanaan dan ini telah dilakukan dengan dikeluarkannya PERMEN PU no 33/PRT/M/2007.

Dalam PERMEN PU no 33/PRT/M/2007 tersebut tidaklah secara jelas disebutkan tentang pangkal pikir pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan petani air. Namun dengan mencermati pasal-pasal pelaksanaannya maka dapat diduga bahwa pelaksanaan pemberdayaan terhadap perkumpulan petani pemakai air sebagai suatu organisasi maupun individu anggotanya dilakukan dengan menganggap kedua unsur tersebut sebagai bagian dari proses produksi dalam pengelolaan irigasi.

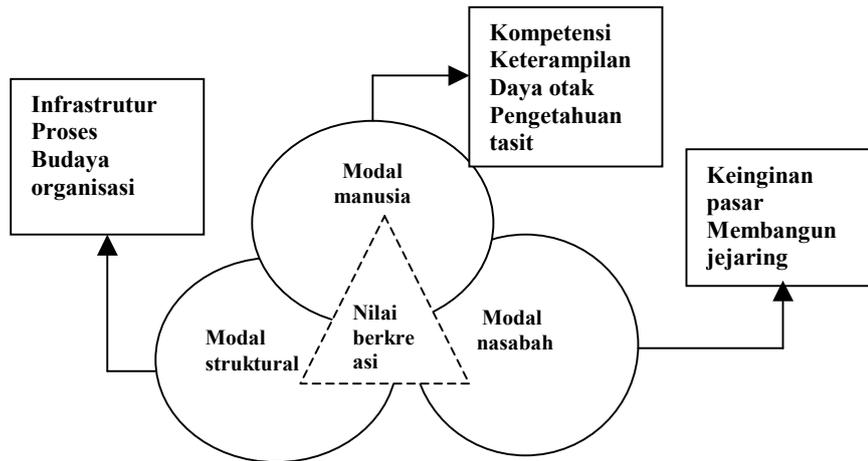
Meskipun dilakukan dengan hampiran partisipatif dan bersifat lokalistik, tetapi pemberdayaan yang dilakukan dengan hampiran seperti yang diamanatkan dalam PERMEN 33/PRT/M/2007 tersebut akan bersifat pemberdayaan yang mekanistik, membentuk organisasi yang kaku dan bersikap statis. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan dilakukan tanpa menganggap kedua unsur tersebut sebagai suatu modal manusia (*human capital*) seutuhnya yaitu makhluk khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai kecerdasan intelektual, emosional dan sosial-spiritual secara utuh. Dengan apa yang dimilikinya maka manusia akan dapat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuannya untuk berkreasi dan berinovasi.

Oleh sebab itu pelaksanaan pemberdayaan organisasi perkumpulan petani pemakai air beserta individu anggota dan pengurusnya sebagai aset pengelolaan irigasi seperti yang diamanatkan PP 20/2006 harus ditafsirkan ulang. Sebagai aset maka diharapkan bahwa baik perkumpulan petani pemakai air maupun sumberdaya manusia yang pendukungnya haruslah dianggap sebagai *human capital*.

Pengembangan *human capital* menuntut pengembangan manusia agar dapat mencapai fitrahnya sebagai pemberi makna, sebagai sumber pengungkit dan penghela organisasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak (Tjakraatmadja, 2006). Dengan hampiran *human capital* ini maka pengelolaan aset-aset lainnya termasuk aset infrastruktur akan memberikan manfaat yang berlipat ganda. Pemaknaan organisasi dan sumberdaya manusia sebagai *human capital* dalam sistem pengelolaan dan proses organisasi sesungguhnya merupakan suatu hampiran yang relatif baru.

Dalam hampiran *human capital* maka pemberdayaan organisasi akan dilakukan dengan fokus untuk membangun suatu organisasi pembelajar dengan mengedepankan hampiran pengembangan modal manusia sebagai bagian dari modal kecerdasan (*intellectual capital*) yang dimilikinya. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang bersifat humanis yang terdiri atas sekumpulan individu yang mampu belajar untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan individualnya dan kemudian ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi melalui proses berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan merupakan suatu metode dalam manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang digunakan oleh anggota untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, teknik, ide yang mereka miliki kepada anggota lainnya (Setiarso, 2006). Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai tiga bentuk pengetahuan, yaitu : (i) pengetahuan kultural, merupakan pengetahuan yang memahami dunia yang diekspresikan dalam bentuk asumsi-asumsi, nilai-nilai, norma yang dimiliki manusia, (ii) pengetahuan tacit atau pengetahuan terbatinkan merupakan pengetahuan untuk memahami dunia dalam bentuk konsep dan diekspresikan dalam bentuk teori dan pengalaman-pengalaman, dan (iii) pengetahuan eksplisit pengetahuan untuk memahami dunia dalam bentuk keahlian atau kognitif, diekspresikan dalam bentuk sistem, peraturan, prosedur dan tata kerja yang ditanamkannya (Tjakraatmadja dan Lantu, 2006).

Selanjutnya Tobing (2007) menyebutkan bahwa modal kecerdasan suatu organisasi terdiri atas modal manusia, modal struktural dan modal nasabah yang digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Proses pemberdayaan yang mengedepankan pengelolaan modal kecerdasan (dimodifikasi dari Tobing, 2007)

Dalam Gambar 1 nampak bahwa untuk memperoleh adanya modal kecerdasan dari suatu organisasi yang ditampilkan dalam nilai berkreasi maka dibutuhkan suatu integrasi masing-masing unsur modal, yaitu : (i) modal struktural yang terdiri atas infrastruktur, dan proses budaya organisasi; (ii) modal manusia, terdiri atas kompetensi, keterampilan daya otak, dan pengetahuan tasit atau pengetahuan terbatinkan; dan (iii) modal nasabah terdiri atas keinginan pasar, dan membangun jejaring.

Pelaksanaan proses pemberdayaan masa lalu dan juga kemungkinan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air menurut PERMEN PU no 33/2007 semuanya dilakukan dengan mengembangkan modal struktural, terutama dalam bentuk pemberian fasilitasi pembangunan infrastruktur, modal manusia dikembangkan dengan melakukan pelatihan dan pengenalan teknologi sedangkan modal nasabah sangat kurang diperhatikan. Dengan demikian nilai berkreasi dari organisasi yang diharapkan dapat muncul pada saat terjadi perubahan lingkungan strategitidak dapat berkembang. Hal ini disebabkan karena individu-individu anggotanya tidak dapat mengembangkan pengetahuannya secara optimal dan membagikan secara bersinergi kepada individu lainnya dalam suatu sistem proses yang ada. Akibatnya adalah organisasi selalu mengharapkan bantuan dan fasilitasi pemerintah untuk menghadapi masalah dan tantangan yang timbul.

Oleh sebab itu pemberdayaan di masa mendatang harus diarahkan dengan mengikuti Gambar 1 dan lebih memperkuat nilai-nilai dalam mengembangkan ketiga unsur modal kecerdasan tersebut secara berkeselimbangan dan bersepadanan.

C. FAKTA SINGKAT TENTANG KINERJA P3A PENGIKUT LOMBA NASIONAL 2007

Sebagai ulasan diberikan suatu contoh dengan menyajikan kinerja P3A dari pengikut lomba nasional tahun 2007. Untuk tahun 2007 ini, Lomba P3A diikuti oleh 26 organisasi Perkumpulan Petani Air, P3A. Semua peserta lomba telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dari data yang dikirimkan peserta lomba nampak bahwa P3A peserta lomba mempunyai dua macam basis pembentukan yaitu berbasis desa dan berbasis tersier. Adanya dua macam basis organisasi P3A tunggal ini dimungkinkan karena disesuaikan dengan proses pembentukannya dulu yang mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dan budaya masyarakat setempat.

Dari ke 26 P3A peserta lomba, 11 P3A di antaranya berbasis hidrologis atau tersier dan sisanya berbasis desa. Peserta lomba berbasis desa biasanya mempunyai luas layanan lebih luas berkisar 53 ha (Subak Batulintang, Bali) sampai terbesar adalah P3A Kuncup Mekar Lampung seluas 560 ha (potensial) dan 348,25 ha efektif. Kecuali P3A Mekar Baru, Propinsi Banten dengan luas 578 ha (1 sadap) maka luas layanan irigasi P3A berbasis tersier kurang dari 100 ha kecuali di areal irigasi pasang surut dapat mencapai 520 ha (potensial) dan 320 ha (aktual) seperti di P3A Kapakat Kalimantan Tengah. Umur P3A peserta lomba adalah berkisar dalam rentang antara 2 tahun (P3A Mekar Baru Banten dan P3A Maluku Utara) dan 23 tahun (P3A Doro Bonto, NTB). Secara lengkap profil P3A peserta lomba nasional dapat dilihat pada Lampiran 1. Selanjutnya Kotak 1 dan Kotak 2 membahas ulasan kinerja peserta lomba dari sudut kelembagaan, produksi, aktivitas lain dan keuangan (Arif dan Puryanto, 2007)

Kotak 1

Kinerja kelembagaan, teknologi, pemasaran dan kegiatan lain P3A peserta lomba Nasional 2007 (Arif dan Puryanto, 2007)

Dari lampiran 1 tercantum bahwa dari 26 peserta lomba, 11 P3A berbasis hidrologis dan 15 peserta berbasis desa. Masing-masing basis mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Dari segi aktivitas maka P3A berbasis desa relatif mempunyai keunggulan karena peran Kepala Desa yang sangat aktif dan biasanya memasukkan aktivitas P3A sebagai bagian dari pembangunan desa atau pembangunan wilayah. Meskipun mempunyai basis kewilayahan berbeda tetapi organisasi P3A ini dalam melakukan tugasnya dapat dikatakan mempunyai struktur institusi pelaksanaan pengelolaan irigasi di aras tersier atau desa hampir seragam di seluruh Indonesia dan selalu dilakukan dengan koordinasi ulu-ulu dan ketua blok/ketua petak.

Keberhasilan penyeragaman tersebut sebenarnya membuktikan bahwa institusi irigasi di aras paling bawah sebetulnya telah lama ada dengan struktur organisasi yang hampir sama di hampir di seluruh Indonesia. Institusi tersebut dalam melakukan tugasnya selalu mandiri dan independen dari kekuasaan pemerintah desa. Ulu-ulu dapat dikatakan menjadi tokoh sentral yang menentukan jadwal pembagian dan pemberian air di seluruh areal tersier. Pada P3A yang masih kental dengan institusi tradisional seperti Tuo Banda di Sumatera Barat misalnya atau Penggawa di NTB otoritas ulu-ulu dalam pelaksanaan manajemen irigasi biasanya relatif lebih dominan. Bahkan kadang-kadang pelaksanaan pengumpulan iuran dan penyelesaian konflik juga masih menjadi tanggung jawab ulu-ulu, ketua blok/ketua petak atau ili-ili. Di hampir seluruh P3A peran pengurus harian hanyalah lebih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi keluar, mencari tambahan pendanaan atau pemasaran, serta tugas-tugas pelaksanaan administrasi dan keuangan.

Kotak 1 (lanjutan)

Selain itu beberapa P3A peserta lomba juga mencantumkan visi dan misinya, bahkan juga masih ditambah dengan tujuan organisasi secara singkat, atau sebaliknya tidak menjelaskan visi dan misi tetapi menjelaskan adanya tujuan pembentukan organisasi, seperti misalnya P3A Kapakat, Kalimantan Tengah. Beberapa P3A menyebutkan visinya secara abstrak dan sangat sulit untuk diwujudkan, seperti misalnya untuk menuju masyarakat tentram dan pelopor pembangunan desa. Beberapa P3A juga telah mempunyai beberapa langkah strategi untuk pencapaian visi dan misi, meski banyak juga yang belum menjabarkannya.

Lampiran 1 juga menerangkan kepada kita bahwa kemampuan P3A untuk mengelola irigasi di wilayah kerjanya juga sangat mengagumkan, dari luasan minimal sebesar 41 ha (DIY) sampai dengan luas 560 ha (efektif 325 ha) di Lampung dan mempunyai 6 petak tersier. Dengan demikian di beberapa P3A sebenarnya lebih berperan sebagai GP3A karena terdiri atas lebih dari satu petak tersier, bahkan di NTT satu P3A terdiri atas 17 tersier (NTT). Keberhasilan dalam pengelolaan irigasi P3A menunjukkan kekuatan modal sosial yang ada di tengah masyarakat. Unsur budaya juga merupakan faktor sangat penting. Di beberapa P3A yang berada di wilayah transmigrasi menunjukkan adanya pencampuran budaya, seperti contoh di Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan adanya institusi mirip subak karena sebagian pengurus dan juga anggota berasal dari Bali. Di banyak tempat lain budaya Jawa lebih menonjol untuk berakulturisasi dengan budaya lokal seperti misalnya di Maluku Utara, Bengkulu, dan Papua.

Upacara-upacara adat dalam pengelolaan irigasi di banyak wilayah masih dilakukan oleh beberapa P3A, seperti Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Subak-Bali. Di Sulawesi Selatan dipakai teknologi peramalan musim secara tradisional dan adanya dialog dalam bentuk institusi adat untuk memulai masa tanam. Semuanya ini menggambarkan bahwa keberadaan budaya sawah masih selalu berhubungan dengan alam. Untuk itu keberlanjutan sumberdaya alam bagi beberapa P3A menjadi sangat penting bahkan menjadi program prioritas, seperti ditunjukkan oleh P3A Kuranji Sepakat, Sumatera Barat yang mengadakan penghutanan dan penghijauan daerah atasannya bekerja sama dengan petani yang membutuhkan tambahan penghasilan karena mempunyai keterbatasan pendapatan. Demikian pula P3A Tani Mulyo, Jawa Tengah yang aktif dalam program GNKPA.

Pendidikan dan pelatihan bagi petani di bidang pengelolaan irigasi juga diperhatikan petani. P3A Tirtasari misalnya juga terkait dalam program pelaksanaan Sekolah lapang Irigasi yang difasilitasi pemerintah kabupaten. Demikian pula beberapa P3A lainnya.

Semua P3A peserta lomba nampaknya memahami tugasnya bahwa wewenang dan tanggung jawab P3A adalah di aras pengelolaan tersier, meskipun sebagian P3A juga bersedia untuk melakukan beberapa kegiatan operasi dan pemeliharaan di aras sekunder. Nampaknya hampir seluruh P3A sangat memahami tatacara operasi pembagian air di aras tersier. Bahkan beberapa P3A juga terlibat dalam pengoperasian di jaringan sekunder misalnya P3A Sulawesi Tenggara. P3A ini juga mengenal efisiensi pemakaian air. Petani sangat memahami penggunaan air pada saat penanaman dengan memberikan air sesuai dengan tingkat pertumbuhan tanaman selain itu pemakaian giliran pemberian air juga mengacu pada faktor K dengan demikian nampaknya P3A sangat memahami tatacara pelaksanaan operasi irigasi secara teknis.

Gerakan pemeliharaan di aras tersier biasanya difokuskan pada perbaikan dan perkuatan jaringan tersier (bangunan dan saluran). Pemerintah nampaknya memfasilitasi upaya perbaikan jaringan tersier ini melalui program pengembangan jaringan Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES). Memang dalam jangka pendek program ini dirasakan besar sekali manfaatnya bagi petani. Tetapi dalam pelaksanaannya diharapkan jangan sampai mengurangi kemandirian petani. Hampir semua P3A peserta lomba sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah dalam perbaikan jaringan irigasi tersier.

Kotak 1 (lanjutan)

Sebagian besar P3A bahkan memasukkan keuntungan pelaksanaan program perbaikan jaringan sebagai salah satu sumber pendanaan, karena dengan melakukan program bantuan tersebut dapat memperoleh keuntungan yang dapat dibagi pada masing-masing pengurus dan juga dipakai untuk tambahan kas P3A.

Perhatian khusus perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten, terutama untuk DI pompa dan pasang surut. Untuk DI Pompa seperti di Kalimantan Timur dan Papua biaya operasi sangatlah mahal. Tanpa adanya bantuan atau subsidi dari pemerintah kabupaten tentu saja akan sangat memberatkan petani. Meskipun demikian perlu dipikirkan tindak lanjut untuk dapat memberikan subsidi tanpa harus menghilangkan kemandirian petani.

Untuk DI pasang surut, masalah yang dihadapi petani adalah lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran pada saat musim kemarau, mutu tanah dan air yang tidak baik untuk pertumbuhan. Selain itu pemakaian benih unggul juga sangat sukar sehingga petani banyak memakai padi varietas lokal dengan hasil relatif rendah dibandingkan dengan pertanian beririgasi di tanah mineral. Penggunaan peta wilayah kerja atau skema sudah melembaga di banyak P3A peserta lomba, yang menarik adalah bahwa di Sulawesi Selatan tidak hanya terdapat peta wilayah kerja tetapi juga peta petak kepemilikan. Adanya peta wilayah dan peta kepemilikan lahan di petak tersier akan memudahkan para pelaksana teknis untuk memecahkan masalah apabila terjadi konflik antar warga yang berkenaan dengan pembagian air di petak tersier.

Selain di DI pasang surut, produktivitas padi di wilayah kerja P3A peserta lomba hampir semuanya di atas rerata produktivitas padi nasional yang berkisar sekitar 5 t/ha. Dan nampaknya hampir tidak ada perbedaan yang nyata antara Jawa dan luar Jawa. Hanya di beberapa tempat seperti Maluku Utara yang mengalami konflik horisontal mempunyai produktivitas lebih rendah dibandingkan dengan P3A lainnya. Produktivitas yang relatif sama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (i) tingkat kesuburan sawah relatif sama, (ii) teknologi dan budi daya sawah sudah melembaga di masing-masing petani, dan (iii) adanya masukan sarana produksi termasuk irigasi yang baik. Dari indikator produktivitas yang sama ini mencerminkan bahwa pemberian fasilitasi pemerintah juga berlangsung sepadan di seluruh Indonesia.

Keberadaan budidaya tanam padi dengan menggunakan metode SRI dan dipakainya alsintan dalam proses produksi serta penggunaan beberapa metode budidaya tanam padi lainnya menunjukkan bahwa petani sangat adaptif terhadap penggunaan teknologi yang menguntungkan mereka. Petani nampak sangat mudah untuk melakukan teknologi baru.

Salah satu kelemahan mendasar yang nampak adalah pemasaran yang rapuh di banyak tempat. Pasar dikendalikan oleh pedagang pengumpul karena tak adanya modal petani sehingga petani tidak mempunyai posisi tawar yang baik. Suatu contoh petani di Sragen (P3A) Tani Mulyo memiliki kemampuan untuk memproduksi padi organik dan di wilayah tersebut juga terdapat pedagang bear padi organik dengan hamparan yang cukup luas dikerjakan petani, tetapi petani tak mempunyai posisi tawar sehingga harga tetap dikendalikan oleh pedagang tersebut, meskipun sebetulnya pedagang tersebut sangat tergantung dari pasok padi organik produksi petani. Bantuan fasilitasi pemerintah harus tetap diberikan untuk membantu petani memperoleh pasar dengan harga beli yang baik. Beberapa usaha pemerintah yang difasilitasi pemerintah nampak memberikan hasil lebih baik misalnya di Sumatera Barat dengan usaha bisnis berbasis Kecamatan.

Karena tak adanya jaminan pasar juga menyebabkan petani enggan untuk mengembangkan komoditi lain di luar padi. Ini banyak terjadi di P3A yang jauh dari kota. Meskipun secara teknis petani dapat menanam komoditi palawija ataupun tanaman hortikultura, tetapi karena tak ada pasar petani enggan untuk menanam. Pemerintah harus memfasilitasi pasar, membentuk lembaga pasar, sarana dan prasarana transportasi, serta informasi harga yang dinamis terutama informasi dugaan harga kedepan. Secara teknis teknologi untuk mensimulasi hasil beberapa komoditi pertanian telah ditemukan dan dikuasai. Apabila dugaan pasar dapat dilakukan maka petani akan dapat mengatur luas tanam bermacam-macam komoditi yang disesuaikan.

Kotak 1 (Lanjutan)

Untuk menambah kas keuangan P3A hampir seluruh peserta lomba mempunyai beberapa usaha bisnis sampingan yang sebagian besar berkaitan dengan usaha pertanian seperti persewaan alsintan, koperasi dan jula beli saprodi, usaha simpan pinjam, bengkel desa dan sebagainya. Usaha-usaha ini merupakan bentuk-bentuk usaha yang perlu diapresiasi. Hanya saja banyak P3A yang melaporkan usaha anggotanya tanpa adanya keterkaitan dengan organisasi P3A. Usaha yang seperti ini tidak usah dilaporkan karena di luar kegiatan organisasi. Yang menarik adalah bahwa di P3A berbasis desa kegiatan P3A ini merupakan bagian dari kegiatan pembangunan desa secara umum. Pemberian fasilitasi pemeliharaan kesehatan yang dicanangkan oleh kepala desa seperti di P3A Tani Mulyo merupakan satu usaha dan terobosan kegiatan yang perlu diapresiasi. Monitoring kesehatan dengan mengeluarkan kartu sehat bagi petani .

Kotak 2

Kinerja aspek keuangan P3A peserta lomba Nasional 2007 (Arif dan Puryanto, 2007)

Ditinjau dari kemampuan untuk mengumpulkan sumberdana untuk pengelolaan irigasi, sebetulnya seluruh peserta lomba menunjukkan adanya kemampuan yang perlu dihargai. Dari Lampiran 1 dapat diketahui bahwa dana P3A berasal dari 4 sumber, yaitu : (i) iuran anggota, (ii) keuntungan dari usaha lainya, (iii) subsidi atau bantuan pemerintah, dan (iv) sumbangan pihak lainnya. Dari keempat jenis pemasukan tersebut, iuran anggota merupakan sumber masukan dana terbesar dan besarnya beragam dari Ro. 10 ribu/ha/tahun sampai hampir Rp. 500 ribu/ha/thn. Keragaman tersebut ditentukan oleh banyak faktor di antaranya ialah : (i) kemampuan petani untuk membayar iuran, semakin kecil pendapatan yang diperoleh dari usaha taninya maka kemampuan membayarpun akan kecil, (ii) kemanfaatan organisasi bagi petani, apabila petani belum melihat manfaat berorganisasi, maka iuran akan relatif kecil. Nilai manfaat yang dirasakan petani ini dapat dilihat dari banyak sudut, apabila ketersediaan air sangat tinggi maka petani akan segan ikut berorganisasi termasuk membayar iuran, atau petani kecewa terhadap organisasi karena selalu tidak dapat mengatasi permasalahan petani, (iii) peran fasilitator dalam pemberdayaan, (iv) masih adanya kontribusi petani dalam bentuk tenaga untuk kegiatan O&P, terutama di jaringan tersier dan kwarter.

Suatu contoh adalah P3A Doro Bonto, NTB, merupakan institusi berlandaskan adat yang bertransformasi ke organisasi modern sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah. Selain iuran wajib sebesar Rp. 20.000,00/tahun anggota P3A masih juga dibebani iuran Rp. 240.000,00/tahun untuk O&P irigasi karena irigasi menggunakan pompa di sebagian jaringannya. P3A ini merupakan contoh dari adanya kejelasan nilai manfaat organisasi bagi petani, meskipun mereka membayar iuran relatif mahal, tetapi manfaat yang diterima juga jelas. Sedangkan P3A Tani Mulyo, Sragen, Jawa Tengah merupakan contoh peranan fasilitator dalam hal ini kepala desa dan camat untuk memasukkan pembangunan irigasi sebagai bagian dari pembangunan desa secara keseluruhan. Adanya tarikan iuran yang relatif tinggi bahkan sangat tinggi dirasakan sangat bermanfaat karena dilakukan untuk perkuatan dinding saluran dengan menggunakan Beton pra cetak dari kawat, pasir dan semen . Sebagian besar sistem jaringan tersier telah dilakukan perkuatan saluran tersebut. P3A Gersamata, Sulawesi Tenggara, merupakan contoh P3A yang menetapkan adanya kontribusi tenaga bagi anggotanya untuk kegiatan O&P di jaringan tersier dan kwarter. Bahkan para anggota juga masih bersedia untuk berkontribusi melakukan pemeliharaan di jaringan sekunder di bawah bimbingan petugas penjaga pintu air dan juru pengairan.

Sebaliknya P3A Mekar Hidayah merupakan contoh P3A dengan kemampuan petani untuk berkontribusi rendah, baru sekitar 10% dari total anggota yang bersedia membayar iuran. Rendahnya modal sosial terjadi karena wilayah ini masih sangat kental dengan konflik.

Kotak 2 (lanjutan)

Masukan dana lain adalah berasal dari sebagian keuntungan karena melakukan pembangunan jaringan irigasi di jaringan Tersier atas bantuan pemerintah. Mungkin bantuan ini merupakan program dari pemerintah sebagai bagian dari perbaikan Jaringan Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi desa (JIDES) yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian. Bantuan ini sangat membantu petani, tetapi apabila tidak dijelaskan secara benar akan dapat menyebabkan ketergantungan petani dalam pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan

Penggunaan danapun juga sangat beragam dari satu P3A ke P3A lainnya. Bahasan di atas menunjukkan bahwa persoalan P3A sangat beragam dan spesifik lokal. Untuk itu diperlukan pemberdayaan yang juga sangat spesifik lokal dan tak dapat dilakukan perampatan atau generalisasi persoalan. Untuk aspek keuangan yang dapat disarankan lebih lanjut adalah : (i) melakukan pemahaman kepada anggota tentang pentingnya melakukan organisasi untuk menghadapi tantangan kedepan; (ii) tidak terlalu mengharapkan bantuan pemerintah sebagai salah satu sumber utama pendanaan karena pemberian bantuan tidak dapat dilakukan secara terus menerus; (iii) mencari alternatif lain dari usaha bisnis yang menguntungkan.

Dari Kotak 1 dan Kotak 2 dapat diketahui bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jaringan irigasi tersier melalui program jaringan Irigasi Usaha tani, JITUT dan jaringan irigasi desa, JIDES. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh P3A dengan fasilitasi pemerintah tersebut maka P3A akan memperoleh keuntungan secara finansial sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal finansial organisasi.

Meskipun banyak P3A peserta lomba yang mempunyai badan hukum, visi, dan misi organisasi yang semuanya dimaksudkan untuk memperkuat budaya organisasi tetapi belum banyak dilakukan oleh P3A karena visi dan misi bersifat abstrak dan sukar dicapai. Sedangkan adanya badan hukum juga tidak banyak diketahui manfaatnya.

Keseragaman nampak dalam struktur organisasi P3A di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh ulu-ulu atau petugas teknis. Institusi ini lebih merupakan suatu adaptasi institusi Desa di Jawa yang dibentuk sejak zaman kolonial Belanda (van der Eng, 1996). Pelaksanaan pengelolaan irigasi dengan sistem ulu-ulu dapat berkembang karena adanya modal sosial berupa *trust* di masyarakat serta adanya kesamaan aras pengetahuan yang dimiliki oleh petani. Kemampuan petani untuk mengembangkan modal finansial sebagai bagian dari modal struktural sangatlah beragam, bahkan di beberapa tempat menunjukkan kekuatan yang sangat potensial, seperti misalnya di Sragen petani dapat mengumpulkan iuran hampir Rp 500 ribu/ha /tahun.

Juga pemerintah memberikan fasilitasi pengembangan pengetahuan individu yang dibagi dan ditransformasikan menjadi pengetahuan organisasi dengan cara mengenalkan dan

melatihkan teknologi baru dalam bidang pertanian, misalnya budidaya *System Rice Intensification*. SRI, mekanisasi pertanian dan teknologi budidaya pertanian lainnya misalnya pemupukan berimbang, pertanian organik dan lainnya secara bertahap dengan sistem demonstrasi plot. Sistem ini merupakan salah satu cara berbagi pengetahuan individu secara bertahap dimulai dari tokoh yang dilatih dan diharapkan akan berkembang ke seluruh anggota organisasi.

Informasi teknologi tentang pengairan baik perancangan, operasi maupun pemeliharaan di aras sekunder tidak banyak diperoleh petani sehingga partisipasi di aras sekunder juga tidak banyak dapat dilakukan petani. Apabila pengetahuan tersebut memberi manfaat kepada mereka nampaknya petani akan dapat dengan cepat mengubah informasi yang diterimanya menjadi pengetahuan tasit sekaligus mentransformasikan menjadi pengetahuan eksplisit, seperti budidaya SRI misalnya.

Dari evaluasi peserta lomba P3A tingkat Nasional tahun 2007 kita juga belum mengetahui benar apakah ada infrastruktur atau institusi yang dapat memfasilitasi adanya transformasi pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi. Memang beberapa P3A telah membangun saung-saung pertemuan sebagai prasarana tukar menukar pengetahuan antar individu anggota dan juga antar fasilitator dengan anggota. Institusi rapat anggota yang dilakukan setahun sekali meskipun dapat dipakai sebagai sarana transformasi pengetahuan tetapi lebih banyak dipakai sebagai ajang pelaporan pengurus organisasi daripada untuk internalisasi pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tasit anggota.

Modal nasabah berupa pengetahuan tentang pasar dan kemampuan berjejaring nampaknya sangat lemah. Tidak adanya informasi yang diperoleh petani tentang pasar menyebabkan petani tak mampu untuk berkreasi karena tak berpengetahuan sama sekali tentang hal itu.

Dari bahasan juga dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar yang dijumpai pada upaya pemberdayaan P3A yang selama ini dilakukan, yaitu : (i) belum adanya kebijakan dan strategi di aras nasional yang dapat dipakai acuan untuk pelaksanaan di aras lokal; (ii) belum adanya institusi yang mampu melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air secara terpadu dan sistematis baik di aras nasional maupun daerah; dan (iii) tidak adanya sistem informasi tentang upaya pemberdayaan yang dapat dipakai untuk mengembangkan pengetahuan petani dalam menghadapi masalah yang berkembang karena adanya dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan strategis.

D. USULAN UNTUK PERBAIKAN UPAYA PEMBERDAYAAN

Dengan diketahuinya tiga kelemahan mendasar tersebut maka langkah-langkah penting untuk melakukan perbaikan upaya pemberdayaan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan dan strategi nasional.

Kebijakan pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air, sesuai dengan Lampiran Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, sub bidang air irigasi, telah ditetapkan dalam butir 4a dan menjadi kewenangan tugas Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi pertanian di provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja apa yang dimaksud dengan kelembagaan perkumpulan petani air ini tidak jelas. Apakah kelembagaan di aras tersier dan aras usaha tani (P3A) saja atau kelembagaan di seluruh aras daerah irigasi (GP3A dan IP3A). Persoalannya adalah bahwa kebijakan nasional tentang pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagai aturan pelaksanaan UU no 7/2004 dan PP 20/2006 telah dikeluarkan oleh PERMEN PU no 33/2007 tentang pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Meskipun demikian aturan yang termuat dalam PERMEN PU no 33/2007 tersebut secara filosofis tidak menjabarkan PP 20/2006 tentang irigasi yang menganggap bahwa organisasi petani pemakai air di berbagai aras pengelolaan irigasi tersebut merupakan sebagian aset pengelolaan irigasi. Secara teoritis apabila diikuti makna organisasi petani pemakai air sebagai aset pengelolaan maka haruslah diikuti bahwa upaya pemberdayaan baik individu manusia dan organisasi dilakukan dengan memakai hampiran pengembangan *human capital* sebagai bagian dari modal kecerdasan (*intellectual capital*) dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Sejauh ini, pelaksanaan pemberdayaan dengan hampiran *human capital* dan manajemen pengetahuan dilakukan pada organisasi-organisasi bisnis yang terpaksa melakukan karena intensitas persaingan global yang sangat tinggi (Tobing, 2007, Setiarso, 2006). Sedangkan untuk organisasi petani belumlah banyak dipikirkan. Oleh sebab itu karena hampiran ini relatif masih baru maka diperlukan suatu diskusi antar pemangku kepentingan untuk menentukan hampiran *human capital* dan manajemen pengetahuan ini pada organisasi petani sebagai kebijakan nasional. Untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan di antaranya adalah adanya kemauan aparat birokrasi untuk melakukan perubahan *mindset* dengan merubah pola organisasi

birokrasi yang hirarkhis dan rigid menjadi organisasi birokrasi yang lentur karena merupakan organisasi pembelajar.

2. Pengembangan institusi pembelajaran pada berbagai aras

Sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan maka institusi yang dibentuk juga haruslah berbentuk organisasi P3A sebagai institusi pembelajar. Sebagai acuan untuk menetapkan tugas dan kewenangan pelaksanaan pemberdayaan dapat dipakai PP 38/2007 dengan beberapa lampirannya, yaitu yang terpenting, Lampiran pembagian urusan bidang pekerjaan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, butir Z 2 sub sub bidang air irigasi, Lampiran pembagian urusan bidang pekerjaan Umum butir C1 sub bidang Sumberdaya Air, dan Lampiran pembagian urusan bidang pekerjaan pemberdayaan masyarakat dan desa butir U2, sub sub bidang kebijakan. Dari PP 38/2007 dan lampiran-lampirannya tersebut maka dapat diketahui bahwa untuk upaya pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air sebagai leading sektornya adalah Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi pertanian di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan instansi terkait adalah direktorat dalam Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas, dan Departemen Dalam Negeri yang membidangi pemberdayaan organisasi petani pemakai air. Tugas dan kewenangan sudah sangat jelas diuraikan dalam Lampiran PP 38/2007 dan juga PP 20/2006.

3. Pengembangan sistem informasi pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air irigasi

Dalam pengelolaan pengetahuan pada organisasi pembelajar, maka adanya infrastruktur tukar menukar informasi menjadi sangat penting. Untuk itu perlu dibangun suatu sistem informasi, tidak saja infrastruktur dalam bentuk perangkat keras (hardware) tetapi juga perlu membangun kompetensi anggota organisasi baik kompetensi teknikal maupun kompetensi perilaku sebagai bagian budaya organisasi. Untuk keperluan pemberdayaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air irigasi maka sistem informasi ini dapat dijadikan bagian dari butir Z 15 pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam praktek di daerah institusi sistem informasi ini sangatlah lemah sehingga informasi tentang pasar dan luas tanam yang disesuaikan dengan pasar dan iklim, serta ketersediaan air irigasi tidak pernah

diperoleh petani, akibatnya petani selalu mengalami kerugian karena rendahnya harga pasar.

E. CATATAN PENUTUP

1. Satu persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pemberdayaan organisasi petani pemakai air adalah dengan memahami bahwa organisasi tersebut merupakan suatu organisasi yang berbasis suatu daerah irigasi dengan sistem manajemen irigasi yang unik dan bersifat lokalistik.
2. Pemahaman terhadap adanya pangkal pikir bahwa organisasi petani pemakai air dengan hampiran *human capital* dan pengelolaan pengetahuan merupakan suatu pembaharuan pemikiran terhadap konsep pemberdayaan organisasi petani yang selama ini dilakukan oleh banyak pihak termasuk pemerintah.
3. Secara faktual telah ditemui adanya organisasi petani pemakai air yang telah berkembang sebagai suatu organisasi berbasis *human capital* dan pengelolaan pengetahuan secara mandiri dengan dimilikinya suatu sistem informasi dan pengelolaan pengetahuan lokal meskipun belum terstruktur dengan baik.
4. Beberapa tentang fakta lapangan tersebut misalnya : kemampuan untuk merancang alat-mesin pertanian seperti yang banyak dilakukan oleh petani di Sulawesi Selatan, adanya pengetahuan kolektif masyarakat yang mengubah sistem organisasi P3A berbasis tersier yang hanya *single access* ke fasilitator pemberdayaan menjadi P3A berbasis desa yang bersifat *multi access* merupakan contoh-contoh yang sangat membanggakan dan perlu diapresiasi. Demikian pula kekuatan modal sosial yang dapat membangun suatu sistem keuangan dan pemodalannya seperti ditunjukkan oleh Petani di Sragen menjadikan suatu optimisme untuk mengembangkan kelembagaan petani pemakai air irigasi ini menjadi suatu organisasi pembelajar yang tangguh.

ACUAN

- Arif. S.S dan D. Puryanto. 2007. Laporan Evaluasi Kinerja P3A peserta lomba tingkat nasional. Laporan disampaikan pada Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Air, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Departemen Pekerjaan Umum RI (tidak dipublikasikan).
- Setiarso. B. 2006. Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan proses penciptaan pengetahuan. <http://www.ilmucomputer.org/wp-content/uploads/2006/09/bse-pengetahuan>.
- Tjakraatmaja. J.H dan D.C Lantu.2006. Knowledge Management dalam konteks organisasi pembelajar. SBM. ITB.327 p
- Tobing.P.L. 2007. Knowledge management : konsep, arsitektur dan implementasi. Graha Ilmu Yogyakarta.210 p
- van der Eng, P. 1996. Agricultural growth in Indonesia : productivity change and policy impact since 1880. Macmillan Press. Ltd. London.369 p.